



BENDAHARA BIRO UMUM PEMPROV BALI DIDUGA TILAP UANG RP 4,2 M

Bendahara Biro Umum Pemprov Bali, WTR diduga menilap anggaran hingga Rp 4,2 miliar. Modusnya cukup rapi sehingga ketika inspektorat melakukan penelusuran tidak menemukan penyimpangan. Dugaan penyimpangan justru didapat saat BPK Perwakilan Bali melakukan audit umum atau rutin.

INFORMASI yang dirangkum *Bali Express* (Jawa Pos Group) dari sumber di BPK RI Wilayah Bali dan Pemprov Bali menyebutkan bahwa ada temuan yang mengejutkan ■ **Baca BENDAHARA 11**



Mana mungkin ada bocoran, tim BPK sedang melakukan audit."

Made Dermawa, Kepala Biro Umum Pemprov Bali

Dermawa Sebut Sudah Beres Padahal BPK Masih Lakukan Audit

■ BENDAHARA...

Sambungan dari Hal 1

Dijelaskan bahwa, selama ini tidak terendus jika ada kejangalan masalah keuangan. Pelakunya diduga Bendahara Pengeluaran di Biro Umum, WTR. Dia adalah seorang staf di Biro Umum yang bertugas menyangkut pengaturan dana di Biro Umum.

"Sudah ditemukan, ada permainan dana. Yang dilakukan oleh WTR, dengan proses yang panjang. Hingga akhirnya terungkap masalah, dana Rp 4,2 miliar," jelas sumber koran ini.

Dia mengatakan bahwa, kasus ini berawal dari indikasi adanya penyimpangan anggaran ditemukan oleh BPK RI Wilayah Bali, ketika melakukan audit khusus. Namun tidak dialami, lantaran audit dilakukan dengan tujuan khusus yang sudah ditentukan objeknya.

"Sudah ditemukan sebenarnya tahun 2016, ada indikasi bahwa keuangan tidak cocok. Namun karena saat ini BPK melakukan audit untuk kepentingan khusus, sudah ada objek yang pasti (objek lain, Red), jadi tidak dialami indikasi temuan

tersebut," kata sumber tadi.

Terkait indikasi tersebut, Inspektorat Bali kemudian melakukan audit. Setelah ditelusuri, ternyata tidak muncul penyimpangan anggaran. Inspektorat cukup lama melakukan pemeriksaan. Namun tidak didapatkan fakta - fakta bahwa ada dana yang ditilap oleh WTR. Dugaan penyimpangan ini akhirnya didapat ketika BPK RI Wilayah Bali, melakukan audit umum atau audit rutin.

"BPK melakukan audit, namun audit umum. Yang dilakukan secara umum, akhirnya ditemukan penyimpangan. Saat ini BPK RI wilayah Bali masih melakukan audit," urainya.

Setelah didalam, ternyata nilainya tak sedikit. Nilai penyimpangan anggaran mencapai Rp 4,2 miliar. "Nilainya tidak sedikit, sampai Rp 4,2 miliar bisa *nilap* uang WTR," urainya.

Modusnya bagaimana? Pola yang dilakukan cukup unik. Untuk menutupi permainan, setiap tahun anggaran di awal ada namanya dana persediaan. Kemudian di akhir anggaran ada SILPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran). Jadi angka SILPA tidak ada

Edisi : Jumat, 10 Maret 2011

Hal : 1 dan 11



dananya, namun ditutupi dengan Anggaran persediaan di awal tahun. "Jadi angkanya ada, seolah-olah dananya ada. Namun fisik dananya tidak ada. Kabarnya WTR sudah mengakui, bahwa dana itu diambil sendiri, tidak untuk orang lain," sambungnya.

Namun tim audit masih tetap bekerja, untuk memastikan masalah ini. Kemudian untuk memastikan posisi kasus ini terang benderang, sehingga nanti bisa ada jalan keluar. Jika memang nanti benar-benar merugikan keuangan negara, setelah hasil audit diumumkan oleh BPK, selama 60 hari ke depan bisa dilakukan pengembalian kerugian negara. Namun jika sampai 60 hari setelah hasil audit diumumkan, tidak ada pengembalian kerugian negara, kondisi ini bisa masuk ke ranah pidana alias tipikor (tindak pidana korupsi).

Selain itu, langkah cepat juga sudah dilakukan di internal Biro Umum. Karena WTR sudah langsung diganti dari posisi sebagai Bendahara Pengeluaran. Inisial penggantinya adalah AWN. "WTR sudah diganti oleh AWN. WTR diminta fokus menjelaskan kasus yang dilakukan kepada tim audit," sambungnya.

Atasan WTR, yaitu Kepala Biro Umum Pemprov Bali Made Dermawa ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa kasus itu sudah selesai. Dan saat ini sudah tidak ada masalah lagi. "Gini aja, saya lagi di Jakarta. Pada intinya kasus itu sudah selesai, sudah tidak ada masalah," jelasnya.

"Siapa yang ngasi tahu?" kejarnya. Setelah dikatakan ada bocoran dari BPK, dia mengatakan tidak mungkin. Lantaran Tim BPK sedang melakukan audit. "Mana mungkin ada bocoran, tim BPK sedang melakukan audit," untkapnya.

Namun penjelasan ini, menjadikan adanya kejanggalan. Dermawa memastikan kasus penyimpangan anggaran sudah selesai dan sudah tuntas, tidak ada masalah. Namun mengakui bahwa BPK masih sedang audit. Artinya belum ada hasil final. Maksudnya sudah selesai, sudah mengembalikan? "Sudah, sudah tidak ada masalah lagi," jawabnya.

Namun ketika ditanyakan terkait angka yang dikembalikan Rp 4,2 miliar, Dermawa berkilah tidak mau bicara angka. "Tidak usah lagi bicara angka, yang pasti sudah tidak ada masalah," pungkasnya. **(art/yes)**